

Pelaksanaan Rekomendasi Laporan EITI Indonesia Tahap II dan Relevansinya Terhadap Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif



Presentasi Oleh:
Taukhid

Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
Semiloka "Pelaksanaan Transparansi dan Upaya Perbaikan
Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia"
Hotel Grand Royal Panhegar, Bandung, Jawa Barat
Rabu, 12 November 2014



EITI =

Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia

To improve openness and accountable management of revenues from natural resources



To eradicate corruption and prevent conflict



To ensure that natural resources can benefit all citizens

Menciptakan tata kelola Industri Ekstraktif serta tata kelola Keuangan Negara yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi



Mencegah pelanggaran, penyelewengan dan penyalahgunaan dalam tata kelola Industri Ekstraktif dan Keuangan Negara



Bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat



Pengelolaan Keuangan Negara

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) :

- Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, **transparan**, dan bertanggung jawab dengan **memperhatikan rasa keadilan** dan kepatutan.



Pelaksanaan EITI dan Upaya Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia

Memperbaiki tata kelola Industri Ekstraktif dan tata kelola Keuangan Negara

Hanya untuk memenuhi requirements dari EITI

KONSTITUSI Pasal 33 ayat (3)

Pengalaman, temuan dan permasalahan tata kelola Industri Ekstraktif yang ditemui selama pelaksanaan EITI di Indonesia

Analisa yang mendalam + pertimbangan situasi dan kondisi real Indonesia

Perbaikan tata kelola Industri Ekstraktif dan tata kelola Keuangan Negara



Prerequisites dalam perbaikan tata kelola:

- Semua pihak yang terlibat setuju dan percaya bahwa proses perbaikan tata kelola ini memang benar-benar dibutuhkan.
- Build a strong coalition and sincere commitment to support the improvement, particularly among the *Key Leaders*.
- Bila memang diperlukan, bisa memanfaatkan “*activity outside of formal boundaries, expectations, and protocol*” dalam proses perbaikan tata kelola ini.

Hal yang perlu untuk lebih dicermati:

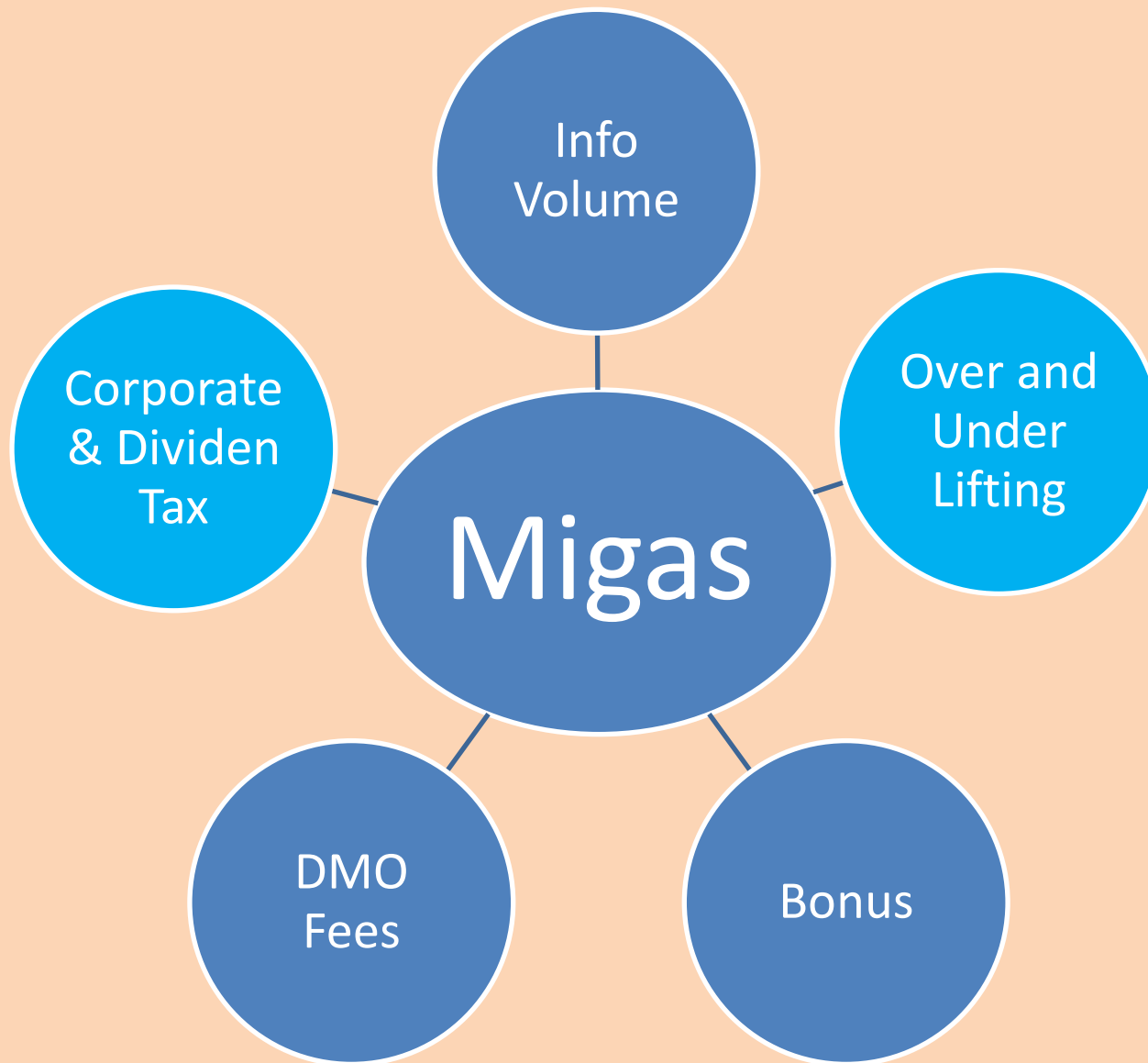
- Mempertimbangkan, meminimalisasi dan mengantisipasi **resistensi** yang mungkin muncul terhadap upaya perbaikan ini.
- Tingginya *turnover* diantara para stakeholders yang terlibat dalam proses perbaikan ini, terutama para Key Leaders.

Rekomendasi
Laporan
EITI Indonesia
Tahap II

```
graph TD; A[Rekomendasi Laporan EITI Indonesia Tahap II] --- B[Migas]; A --- C[Minerba];
```

Migas

Minerba



Corporate & Dividen Tax

Formulir laporan kurang informative, khususnya terkait denda dan pemakaian cash basis

DJA/EITI Sec.

DJA/
EITI Sec.

Perlu adanya petunjuk pengisian laporan

Penyetoran penerimaan Negara dari KKKS agar disertai info ttg masa pajak dan lokasi Blok PSC-nya

DJA/
DJP/SKK
Migas

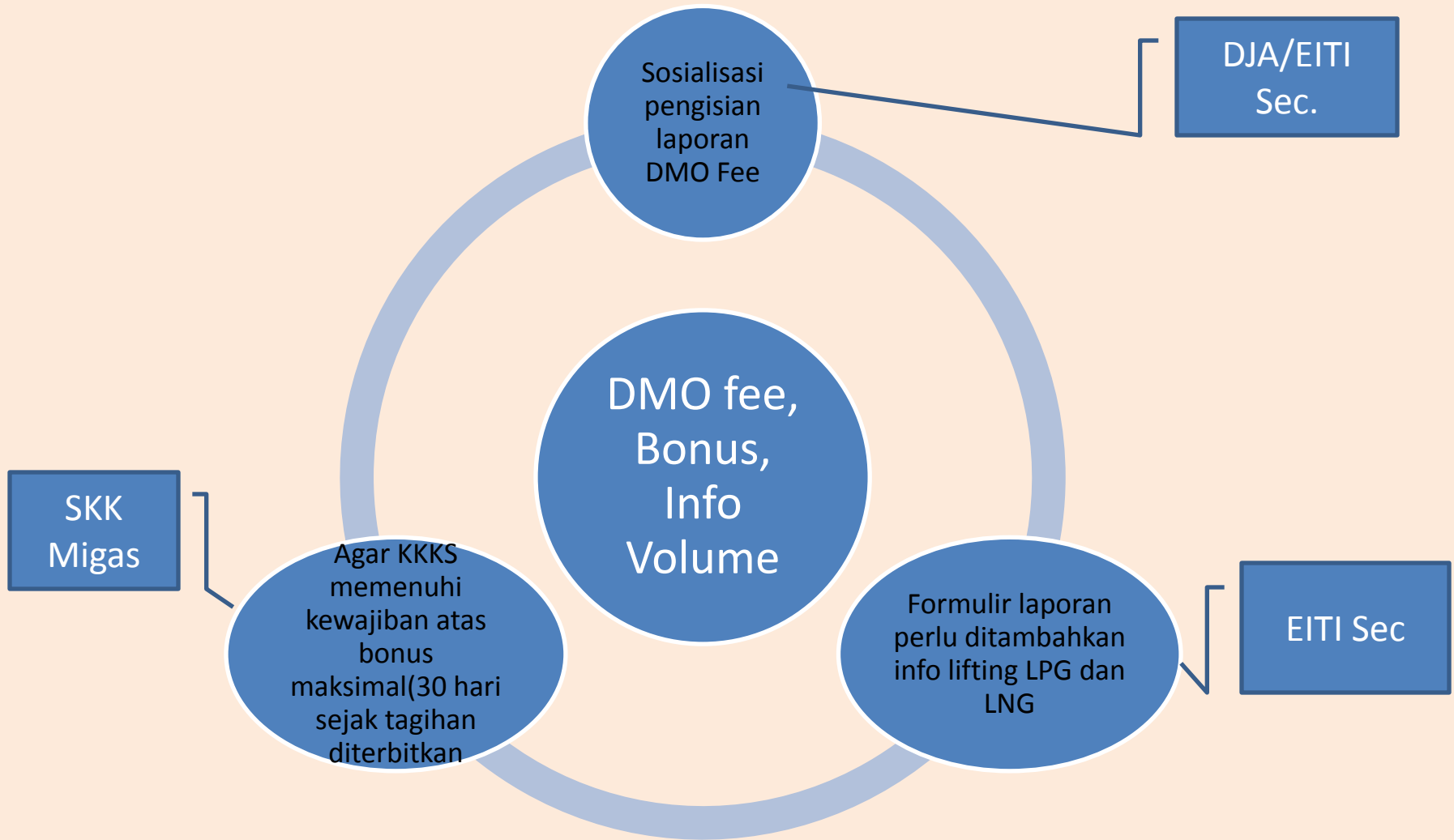
Under & Over Lifting

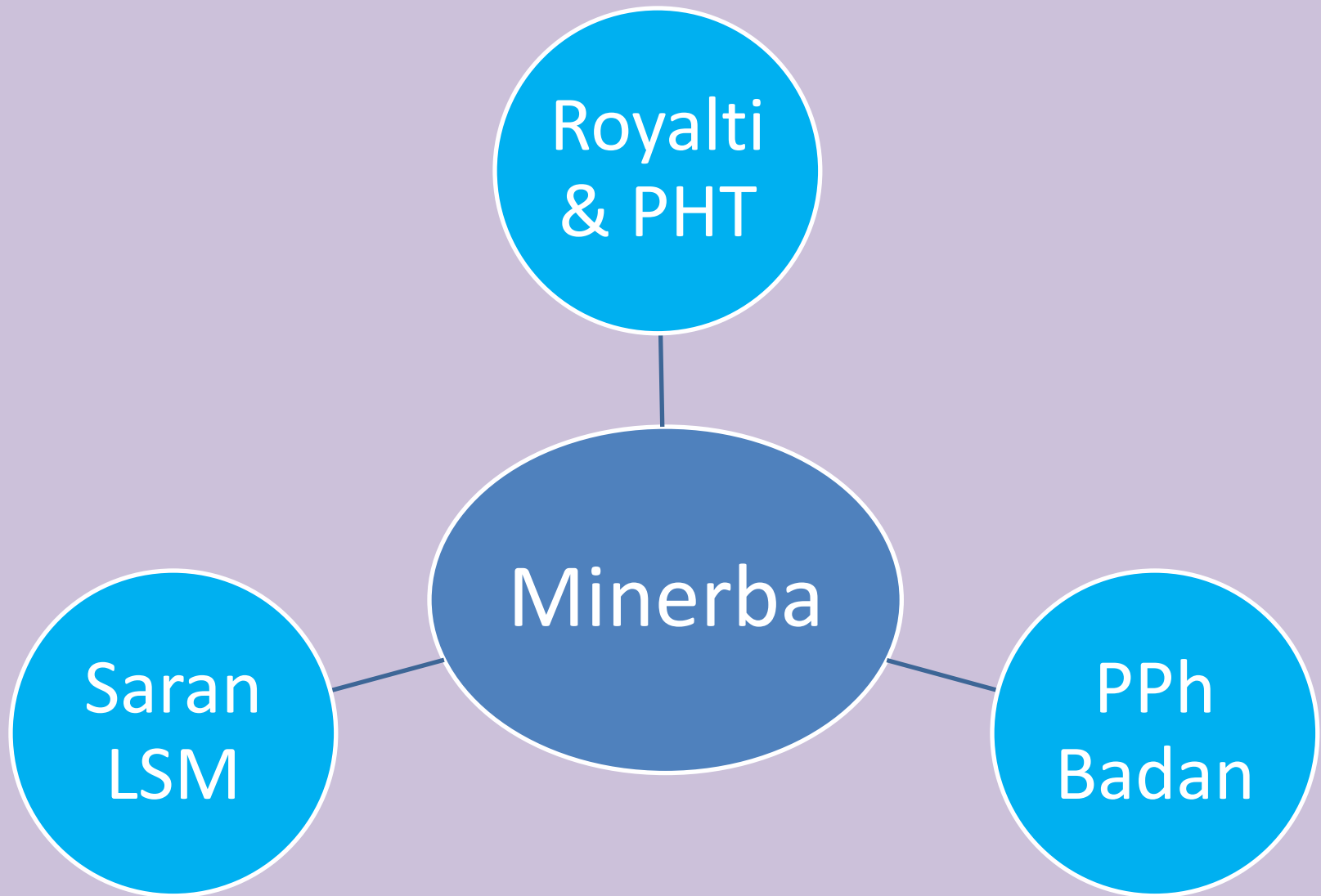
Untuk
pelaporaan
over/(under)
lifting agar
menggunakan
volume,
bukan USD

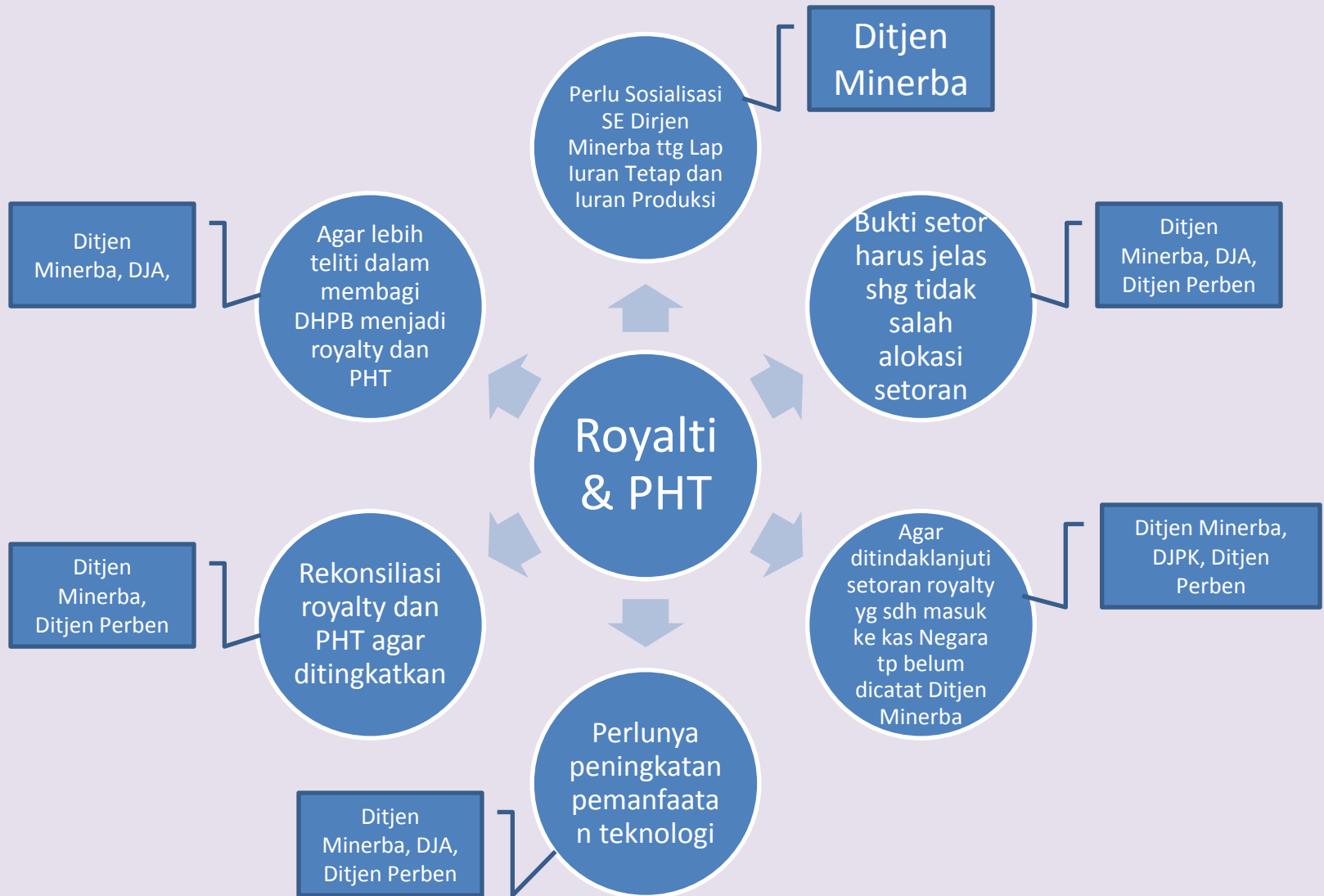
SKK
Migas/
EITI Sec

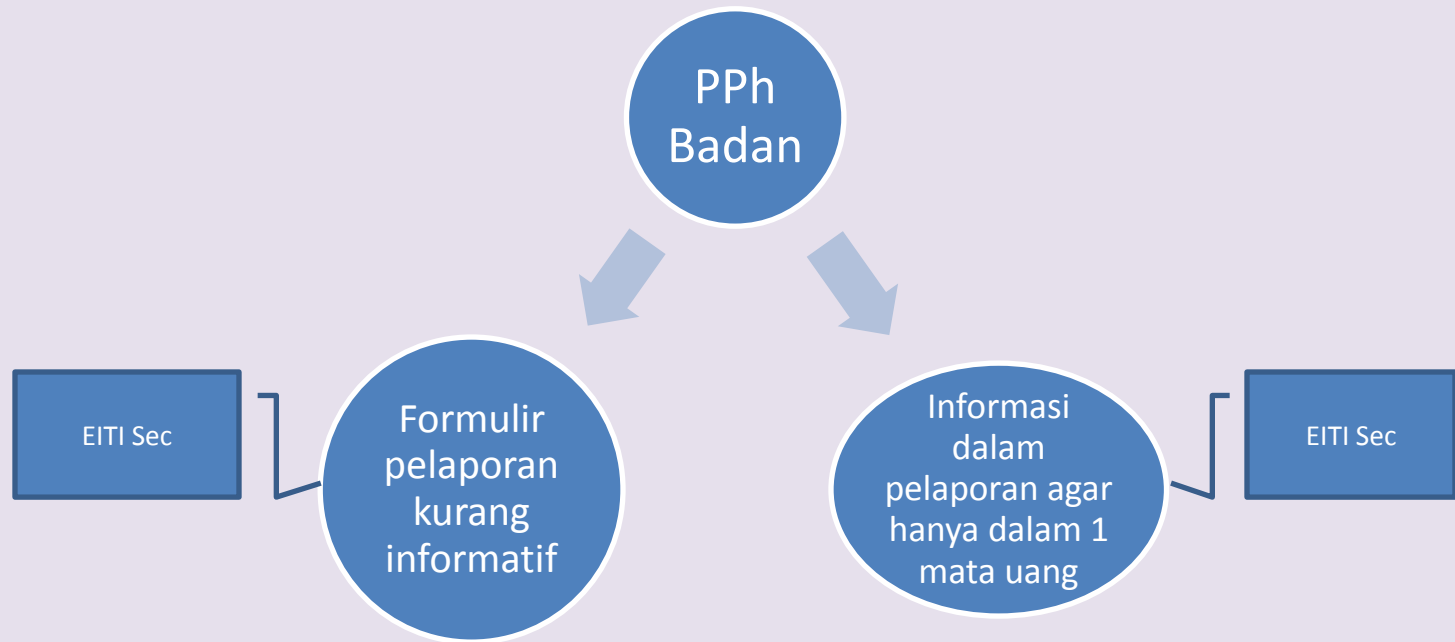
Sosialisasi
ttg
pengisian
pelaporan

SKK
Migas/
EITI Sec









Saran LSM



```
graph TD; A((Saran LSM)) --> B(Perlu adanya kehadiran perwakilan dari masyarakat sipil dalam EITI dalam proses penyelesaian teknis); A --> C(Proses verifikasi dalam tindak lanjut dan penyelesaian dari hasil rekonsiliasi harus dapat dijelaskan secara transparan);
```

Perlu adanya kehadiran perwakilan dari masyarakat sipil dalam EITI dalam proses penyelesaian teknis

Proses verifikasi dalam tindak lanjut dan penyelesaian dari hasil rekonsiliasi harus dapat dijelaskan secara transparan



Rekomendasi Penting Lainnya

Topik isu	Rekomendasi	Follow Up	Unit Terkait	Target
Optimalisasi Pemanfaatan Sistem MPN	Perlu didiseminasikan pemanfaatan sistem MPN dalam penyetoran penerimaan negara oleh perusahaan, dan men-discourage penggunaan mekanisme transfer langsung ke rekening Kas Negara di BI	<ol style="list-style-type: none">1. Penyebarluasan Informasi melalui mekanisme sosialisasi, surat edaran, dan media lain yang dipandang efektif.2. Evaluasi & Revisi peraturan terkait	Ditjen Perben Ditjen Minerba Ditjen Pajak Dit PNB, DJA Sekretariat EITI	Semua penerimaan negara dari industri ekstraktif disetorkan melalui sistem MPN.




Relevansi Pelaksanaan Rekomendasi Terhadap Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif

- Setoran penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif bisa lebih mudah dilakukan, valid, informatif, akurat dan akuntabel.
- Pelaksanaan tata kelola industri ekstraktif bisa lebih sederhana, mudah dan cepat.
- Masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi tentang penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif dan jumlah yang diinformasikanpun bisa lebih valid.
- Masing-masing pihak yang memiliki hak atas penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif bisa menerima pembagian sesuai dengan haknya secara tepat sesuai dengan kontribusinya.
- Tidak ada lagi pihak (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar tambang) yang dirugikan dalam tata kelola industri ekstraktif di Indonesia.



What's Next?





THANK YOU